

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdurrahman, SH, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1986.
2. Abdul Muis H, SH, MS, Pedoman Penulisan dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan FH - USU, Medan, 1990
3. Barbara Ward dan Rene Dubos, Hanya Satu Bumi, diterjemahkan Oleh Lembaga Ekologi UNPAD dan Yayasan Obor, Bandung, 1980.
4. BPHN, Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta, Bandung, 1977.
5. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, DR, SH, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, Jilid 1, Alumni Bandung, 1979.
6. Emil Salim, Prof DR, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1982.
7. Fuad Amsyari, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
8. Irfan Islamy, M. Drs. MPA, Prinsip-prinsip Perurusan Kebijakan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
9. Koesnadi Hardjosoemantri, Prof, SH, Hukum Tata Lingkungan, edisi keempat, diterbitkan Gadjah Maa Press, 1989.
10. Muchsan, SH, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1981.

11. Munedjat Danusaputro, St. Prof. Mr, Hukum Lingkungan Buku 1, Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1986.
12. Otto Soemarwoto, Permasalahan Lingkungan Hidup, Makalah pada Seminar Segi-segi Pengelolaan Lingkungan Hidup, BPHN, Bina Cipta, Bandung, 1977.
13. Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Penerbit Gajah Mada University Press, cet keenam, 1999.
14. Poerwadarminta WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
15. Prajudi Atmosudirja, Prof. DR. Mr, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, 1981.
16. Simorangkir JCT, SH, et al, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
17. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
18. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1983.
19. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 2000.
20. Utrecht. E. Dr, Pengantar Hukum Administrasi Negara, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Jln. T. Daud No.5 Telepon 061. 537050 Fax 061. 537050

M E D A N

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4/341/BAPDAL-SU/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johnny Ginting, SH
Nip : 400029126
Jabatan : Sekretaris Bapedaldasu Propinsi Sumatera Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Sufianto
Agama : Islam
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Tinggal : Jl. Sei Musi No.18A Medan

Telah melakukan riset di kantor Bapedalda Propinsi Tingkat I Sumatera Utara sejak tanggal 2 Mei 2001 sampai dengan 1 Juni 2001 untuk melengkapi persyaratan dalam penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 1 Juni 2001

An.KEPALA BAPEDAL PROP.SU
SEKRETARIS

JOHNY GINTING, SH
PEMBINA
NIP.400029126



UNIVERSITAS MEDAN AREA

JALAN KOLAM NOMO 1 MEDAN ESTATE TELEPON 716878, 716998, 716781, 714348, FAX 718168, MEDAN - 20223

Nomor : 0571 / A. 1. 2. 3 / 2001
Lamp :
lfl n l : Pengambilan Data

Medan, 26 Februari 2001

Kepada : Yth. Kepala
Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara
di
T e m p a t.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan saudara untuk memherikan izin dan kesempalan kepada mahasiswa kami,

N a m a : Ahmad Sulianto
No. Stambulok : 97 840 0130
Jurusan : Hukum Adm. Negara
Fakultas : Hukum

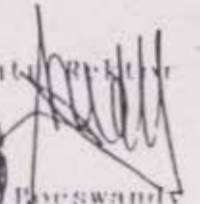
untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara.

Guna penyusunan skripsi mahasiswa yang berjudul
" Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
dalam Monev dan Melakukan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dan Lingkungan Hidup ".

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah
semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi
ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut
untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas
Hukum Universitas Medan Area.

Demikian kami mohon semoga dapat diberikan kemudahan dalam
pengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan
yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai
melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
yang baik diucapkan terima kasih.


Roeswandy
